AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh**:**
MUHAMMAD FAHDEL
1610012111180

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG 2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg:23/Skripsi/HTN/II-2023

Nama	: **MUHAMMAD FAHDEL**
NPM	: **1610012111180**
Bagian	: **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	: **Akuntabilitas Dan Keterbukaan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website.*

Dr. Maiyestati . S.H., M.H. **(Pembimbing)** _____

AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Muhammad Fahdel[1], Dr. Maiyestati, S. H., M. H[1]
[1]Program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Muhammadfadel301296@gmail.com

ABSTRACT

One of the obligations of the Regional Government in submitting reports is to present information on Regional Government Implementation Reports to the public. However, the author sees that the transparency carried out by the West Sumatra provincial government has not been maximized, even though there is an official page on the internet that can be accessed by the public regarding regulatory products. The aims of the study were 1) to analyze the influence of accountability and transparency of regional heads in realizing good governance in West Sumatra Province, 2) to analyze the constraints faced by the regional government of the West Sumatra Provision in realizing good governance, 3) to analyze the efforts of the regional government of West Sumatra Provision in overcoming obstacles to realize good governance. This type of research is a sociological juridical approach and is descriptive in nature. The types of data are primary and secondary. Data collection techniques are documentation and interview techniques. The results of this study are that the regional governor of West Sumatra Province has implemented the principles of accountability and transparency based on a good governance assessment. The regional head governor of West Sumatra Province has obstacles in realizing good governance, convoluted bureaucracy, road congestion, uneven development, and social inequality. The regional governor of West Sumatra Province has made various efforts to realize good governance, including bureaucratic reform, preventing road congestion, equitable development, and anticipating social inequality. The conclusion of this study is that the regional governor of West Sumatra Province has implemented good governance well.

Keywords*: good governance, accountability, transparency, governor of West Sumatra*, local government

I. PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Melalui transparansi

penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan adalah menyajikan informasi Laporan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Akan tetapi Penulis melihat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal, walaupun ada laman resmi di internet yang bisa diakses oleh masyarakat terkait produk peraturan dan lain sebagainya. Namun hal ini belum menunjukkan transparansi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)"**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan keterbukaan Gubernur Kepala Daerah dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh gubernur kepala daearah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
3. Apakah upaya gubernur kepala daerah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik?

B. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk menganalisa apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
3. Untuk menganalisa apakah upaya pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendekatan secara yuridis sosiologis dan bersifat deskripstif. Jenis data adalah primer dan sekunder. Tenik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHAHASAN

a. Pengaruh Akuntabilitas dan Keterbukaan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggaraan *good governance*, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik dilingkungan biroksi maupun di lingkungan masyarakat. Wawancara telah dilakukan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Ahli I Perancang Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada wawancara ini diwakili oleh Bapak Fabio Sadino dan diperoleh informasi terkait akuntabilitas bahwa 1) pelaksanakan prinsip

akuntabilitas gubernur kepala daerah propinvi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemerintahan sudah mengacu pada *assessment* pemerintahan yg baik. 2) Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai aturan dan mengelola informasi daerah secara akurat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3) Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat terbuka dalam penyampaian informasi publik melalui medsos dan sosialisasi informasi publik kepada pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Masyarakat mengetahui proses, fakta, dan nilai (angka) yang dihasilkan dari suatu aktivitas pemerintah. Dalam praktiknya, transparansi sering diwakili oleh kemudahan akses dan ketersediaan informasi dari berbagai aktivitas pemerintah kepada publik.

b. Kendala yang dihadapi oleh Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *Good governace*

Kendala-kendala yang dialami gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan *Good governace*. Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat masih mempunyai kendala dalam masalah kesenjangan sosial di kota Padang, antara lain pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan hukum, rendahnya mutu SDM, dan meningkatnya jumlah pengemis, dan anak jalanan.

c. Upaya-upaya gubernur kepala daerah Provisi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan *Good governace*

Gubernur kepala daerah Provisi Sumatera Barat dan lembaga pemerintah lainnya telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan *Good governace* antara lain:

a. Reformasi birokrasi, Pemerintah terus memperbaiki diri dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi dengan kriteria daptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara.
b. Penanggulangan kemacetan melalui kebijakan transportasi berdasarkan *availability*
c. Pemerataan pembangunan
   Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai *mainstream* pembangunan ekonomi ke masa depan.
d. Penanggulangan kesenjangan sosial, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru/UMKM, pencegahan korupsi dengan memberikan sanksi yang lebih berat dan Pendidikan budaya anti korupsi di sekolah sampai dengan perguruan tinggi.

Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Akuntabilitas dan keterbukaan berpengaruh dalam pelaksanaan *good governance* Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kendala-kendala dalam mewujudkan *good*

governance, birokrasi yang berbelit-belit, kemacetan jalan, pembangunan yang belum merata, dan kesenjangan sosial

3. Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan *good governance*, antara lain reformasi birokrasi, mencegah kemacetan jalan, pemerataan pembangunan, dan mengantisipasi kesenjangan sosial.

B. SARAN

1. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan birokrasi bagi masyarakat.
2. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar meningkatan pemerataan pembangunan hingga pinggiran kota
3. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Sedarmayanti, 2003, *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta

Haris Hardiansyah, 2010, *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Salemba Humanika, Jakarta

Jurnal-Jurnal

Munawaroh, Nunung, 'Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik', *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No. (2019), 143–56

BKSI, "Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" Disajikan pada seminar "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Memberdayakan Momentum Reformasi", Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001

Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas, 'Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di kantor camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.37 (2016), 1–9

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu kepada ibu **Dr. Maiyestati, S.H., MH.** selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu luang dan bimbinganya untuk menyelesaikan karya ini dengan baik dan juga kepoada berbagai pihak yang telah membantu penulis unutk menyelesaikan karya ini tepat waktu